

**IMPLEMENTASI PROGRAM GENERASI BERENCANA SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN
JOMBANG**

Dewita Rahma Aisyah

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
dewitaraisyah@gmail.com

Achluddin Ibnu Rochim

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
didin@untag-sby.ac.id

Radjikan

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
radjikan@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Early marriage remains a significant problem in Jombang Regency and has the potential to cause various negative impacts on adolescents. The Generation Planning Program (GenRe) is used by the Jombang Regency Government as an effort to prevent early marriage. This study uses the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn which includes policy standards and objectives, resources, communication between organizations and implementing activities, characteristics of implementers, economic, social and political conditions, and implementer dispositions. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the GenRe Program in Jombang Regency has been running quite well, marked by clear program objectives, ongoing coordination and cooperation between implementers. However, program implementation still faces several obstacles such as budget limitations, suboptimal sustainability of PIK-R at the village level, low participation of some adolescents in program activities, and the strong influence of economic factors, social environment, and community mindsets on the occurrence of early marriage. Based on these findings, the Generation Planning Program has played a role in efforts to prevent early marriage in Jombang Regency, but the effectiveness of its implementation still needs to be improved by strengthening program sustainability.

Keyword: *Policy Implementation, Program Generasi Berencana, GenRe Jombang, Van MeterVan Horn*

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan yang cukup tinggi di Kabupaten Jombang dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi remaja. Program Generasi Berencana (GenRe) digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta disposisi pelaksana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program GenRe di Kabupaten Jombang telah berjalan cukup baik yang ditandai dengan adanya tujuan program yang jelas, koordinasi dan kerja sama antar pelaksana yang berjalan. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi beberapa kendala berupa keterbatasan anggaran, belum optimalnya keberlangsungan PIK-R di tingkat desa, rendahnya partisipasi sebagian remaja dalam kegiatan program, serta kuatnya pengaruh faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan pola pikir masyarakat terhadap terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan temuan tersebut Program Generasi Berencana telah berperan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jombang, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan keberlanjutan program.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Program Generasi Berencana, Genre Jombang, Van Metervan Horn*

A. PENDAHULUAN

Indonesia di tengah isu penurunan angka pernikahan dini secara nasional hingga 7,5% pada tahun 2023, masih saja dihadapkan dengan segudang masalah pernikahan anak dini. Berdasarkan laporan data UNICEF 2023 menempatkan Indonesia di posisi keempat global dalam hal pernikahan anak, dengan perkiraan jumlah anak Perempuan menyentuh 25,53 juta jiwa. Sehingga dinobatkan sebagai negara yang memiliki kasus perkawinan anak terbesar di Kawasan ASEAN. Pernikahan anak sendiri bukanlah salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ekonomi maupun permasalahan sosial. Perkawinan anak justru menjebak mereka yang usianya masih dibawah umur masuk ke dalam permasalahan yang lebih kompleks. Terjadinya pernikahan anak dini di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, seperti adat istiadat, perekonomian, serta maraknya pergaulan bebas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan peraturan yang bersifat nasional dan menjadi landasan pedoman bagi masyarakat Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan.

Satu dari sembilan perempuan menikah di Indonesia dinikahkan di usia anak. Perkawinan usia anak merampas masa kecil anak perempuan dan mengancam kehidupan serta kesehatan mereka. Seorang anak akan menerima dampak kerugian dari fenomena pernikahan dini, pasalnya mereka menikah dengan usia yang terbilang cukup muda serta rentan terhadap berbagai masalah kesehatan maupun

sosial. Anak perempuan yang kawin sebelum berumur 18 tahun empat kali lebih besar mengalami resiko gagal menuntaskan pendidikan menengahnya dibandingkan dengan perempuan lain, kerugian ekonomi sebesar 1,7% dari pendapatannya, rentan pula mengalami kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian, Komplikasi saat kehamilan dan persalinan menjadi penyebab kematian terbesar kedua bagi anak perempuan usia 15–19 tahun di Indonesia. Perempuan muda yang melahirkan juga berisiko mengalami kerusakan organ reproduksi. Selain itu, bayi yang lahir dari ibu di bawah usia 20 tahun memiliki peluang 1,5 kali lebih besar meninggal sebelum usia 28 hari. Tak hanya itu, sekitar 1 dari 3 balita yang lahir dari ibu usia muda berisiko mengalami tengkes (stunting).

Kabupaten Jombang merupakan wilayah yang mengalami isu sosial pernikahan dini. Adanya tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, pernikahan anak masih banyak terjadi, khususnya di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan pendidikan. Hingga September 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-PPA) Jombang, tercatat 520 kasus pernikahan dini. Disebarkannya data tersebut, menunjukkan pernikahan di bawah usia 19 tahun masih berlangsung, meskipun telah ditetapkan regulasi terkait pembatasan usia nikah.

Sebagai upaya menekan kasus tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 yang memberikan mandat langsung kepada DPPKB-PPA untuk menjalankan program pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan edukatif, sosialisasi berbasis komunitas, dan intervensi kelembagaan. Program Generasi Berencana yang merupakan Program turunan dari BKKBN. Kebijakan ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta mendukung upaya perlindungan anak dari dampak sosial, kesehatan, dan ekonomi akibat pernikahan di usia yang belum matang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan fokus penelitian untuk menganalisis implementasi Program Generasi Berencana sebagai bentuk upaya pemerintah Jombang dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Adapun sumber data dari penelitian ini bersumber dari data primer, yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan yang dipilih yaitu Kabid K3 DPPKB-PPA, Ketua IPeKB, Kepala PLKb Kecamatan Jogoroto, Kepala KUA Kecamatan Jogoroto, Ketua Forum GenRe dan 2(dua) remaja yang melakukan pernikahan dini, serta melakukan observasi dan dokumentasi guna mendukung validitas penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan sasaran Program Generasi Berencana (GenRe) di Kabupaten Jombang telah dipahami dengan cukup baik oleh para pelaksana. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, perencanaan

kehidupan berkeluarga, serta pencegahan perilaku berisiko yang dapat memicu terjadinya pernikahan dini. Sasaran program meliputi remaja, calon pengantin, dan keluarga yang memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan terkait pernikahan. Meskipun demikian, hasil penelitian menemukan bahwa masih terdapat sebagian remaja yang belum mengenal Program GenRe secara langsung, sehingga menunjukkan bahwa sasaran program belum sepenuhnya tercapai secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

2. Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program GenRe didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai, mulai dari DPPKB-PPPA, IPeKB, PLKB, KUA, Forum GenRe, kader, hingga penyuluh agama yang terlibat aktif dalam pelaksanaan program. Namun, dari sisi sumber daya finansial masih terdapat keterbatasan yang menjadi hambatan utama dalam menjaga keberlangsungan program, khususnya di tingkat desa. Keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa PIK-R tidak dapat berjalan optimal bahkan mengalami kondisi vakum. Untuk mengatasi hal tersebut, para pelaksana melakukan berbagai upaya seperti memaksimalkan kegiatan di sekolah, berkolaborasi dengan Posyandu Remaja, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak agar kegiatan edukasi dan pendampingan tetap dapat dilaksanakan.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antar organisasi pelaksana telah berjalan dengan cukup baik. DPPKB-PPPA, IPeKB, PLKB, KUA, Forum GenRe, kader, dan stakeholder lainnya secara aktif menjalin kerja sama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, seperti Bimbingan Perkawinan (Bimwin), BRUS, BRUN, PIK-R, Gema Desa, dan kegiatan sosialisasi lainnya. Komunikasi yang terjalin juga mampu menyelesaikan perbedaan pandangan yang sempat muncul antar pelaksana melalui proses koordinasi yang berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas komunikasi kepada kelompok sasaran masih belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan remaja yang menerima pendampingan dan edukasi tanpa mengetahui bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program GenRe.

4. Karakteristik Pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing pelaksana memiliki peran dan fungsi yang jelas sesuai dengan kewenangannya. DPPKB-PPPA berperan sebagai fasilitator dan koordinator program, IPeKB sebagai pembina Forum GenRe dan kader, Forum GenRe sebagai pelaksana sosialisasi kepada remaja, PLKB sebagai edukator dan pendamping masyarakat, sedangkan KUA berperan dalam pembinaan perkawinan dan pelayanan administrasi pernikahan. Pembagian tugas tersebut membuat pelaksanaan program dapat berjalan secara terstruktur dan saling melengkapi. Selain itu, para pelaksana tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan edukasi dan pendampingan kepada kelompok sasaran.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan sosial masih menjadi tantangan terbesar dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jombang. Kondisi ekonomi keluarga yang relatif rendah mendorong sebagian orang

tua untuk menikahkan anaknya di usia muda sebagai upaya mengurangi beban keluarga. Selain itu, faktor pergaulan remaja, kehamilan di luar nikah, budaya perjudian, serta kebiasaan menikah muda dalam lingkungan keluarga turut memengaruhi tingginya angka pernikahan dini. Di sisi lain, dukungan politik terhadap Program GenRe cukup baik yang ditunjukkan melalui keterlibatan pemerintah daerah dan berbagai stakeholder dalam mendukung pelaksanaan kegiatan edukasi, pembinaan, dan sosialisasi kepada masyarakat.

6. Sikap/Kecenderungan Pelaksana (Disposisi)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaksana memiliki komitmen dan kesungguhan yang tinggi dalam menjalankan Program GenRe. DPPKB-PPPA terus memberikan dukungan melalui pembinaan dan fasilitasi kegiatan, IPeKB secara aktif mendampingi Forum GenRe, sementara PLKB dan KUA tetap konsisten memberikan edukasi kepada masyarakat dan calon pengantin meskipun hasilnya tidak dapat dicapai secara instan. Forum GenRe juga menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada remaja. Komitmen tersebut turut dirasakan oleh kelompok sasaran melalui pendampingan dan edukasi yang diberikan oleh kader dan penyuluh sebelum maupun setelah memasuki kehidupan berkeluarga.

7. Kendala Yang Mempengaruhi Implementasi Program GenRe Kabupaten Jombang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program GenRe masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi pencapaian tujuan program. Kendala tersebut meliputi keterbatasan anggaran, vakumnya beberapa PIK-R akibat kurangnya regenerasi anggota, rendahnya partisipasi remaja dalam kegiatan di desa, serta minimnya pelaporan kasus kehamilan remaja kepada instansi terkait sehingga tidak semua kasus dapat ditangani sejak awal. Selain itu, faktor sosial seperti pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, budaya menikah muda, dan pola pikir masyarakat yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar masih menjadi tantangan yang sulit diubah dalam waktu singkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program GenRe tidak hanya ditentukan oleh kinerja pelaksana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan sosial dan partisipasi masyarakat.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jombang telah berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari adanya kerja sama antar stakeholder, pembagian peran yang jelas, serta komitmen pelaksana dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada remaja. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan anggaran, belum optimalnya keberlangsungan PIK-R, serta belum meratanya jangkauan program kepada seluruh remaja. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, dan pola pikir masyarakat masih menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, keberhasilan pencegahan pernikahan dini memerlukan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga

keluarga, sekolah, dan masyarakat agar tujuan Program GenRe dapat tercapai secara lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Batyra, E., & Maria, L. (2021). SSM - Population Health Trends in child marriage and new evidence on the selective impact of changes in age-at-marriage laws on early marriage. *SSM - Population Health*, 14, 100811. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100811>
- Evania, A., Sjahrinal, S., & Casmiwati, D. (2024). *Implementasi Program Generasi Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya*. 3(1), 46–56.
- Kidman, R., Raub, A., Martin, A., Bhuwania, P., Bose, B., & Heymann, J. (2024). Children and Youth Services Review Reducing child marriage in sub-Saharan Africa : Evaluating the joint potential of protective marriage and education policies. *Children and Youth Services Review*, 164(August 2023), 107877. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2024.107877>
- Mulyawan, B., Mailiyatuzzahro, N., Kebijakan, I., & Masalah, A. L. B. (2021). *Implementasi Program Generasi Berencana Di Kabupaten Indramayu*. 11(2).